

## **UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**(Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

**Wahyu Sri Wulandari<sup>1</sup>, Afifuddin<sup>2</sup>, Taufiq Rahman Ilyas<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*Email : [wahyusri2522@gmail.com](mailto:wahyusri2522@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama dan (3) untuk Mengetahui Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Dan Apa Perannya. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, pengumpulan data yang akan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama yang di ukur dengan tiga indikator efektifitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Lalu untuk responsivitas daya tanggap dinas sosial dan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sudah cukup baik. Lalu untuk kendala yang dihadapi terletak dari sumber daya manusianya. Untuk yang terlibat aktor ada yang dari pusat, penerima kebijakan(provinsi), yang menerapkan(kabupaten/kota).*

Kata Kunci : Kinerja Dinas Sosial, Kendala, Aktor dalam kelompok usaha bersama (KUBE)

### **Pendahuluan**

Melihat adanya fenomena keadaan yang terjadi di negara Indonesia. Meskipun Indonesia sudah dikatakan merdeka, namun faktanya masih banyak warganya yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok. Kemiskinan juga merupakan suatu bentuk masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga menjadi suatu persoalan yang tidak asing lagi, suatu persoalan mendasar karena disatu sisi hal ini tidak hanya di alami satu daerah, melainkan diberbagai daerah yang pasti adanya persoalan tersebut.

Hal ini juga termasuk sebagai indikator ketidakberhasilan suatu proses pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup

layak (BPS dan Depsos 2002:3). Kemiiskinan merupakan permasalahan yang harus dituntaskan karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kemah dan tidak bermartabat. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi Indonesia dapat kita lihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multidimensi dan kesenjangan anatar-wilayah. (Wrihatnolo, 2008 hal 15-19)

Salah satu strategi untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat (community development) bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek melainkan subjek.

Dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah memiliki beberapa upaya

dengan mengeluarkan Perpres No 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Perpres No 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Permensos 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan Fakir Miskin. Kelompok usaha bersama (kuba) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Usaha ekonomi produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Kuba beranggitakan 5 sampai 20 kepala keluarga dalam masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (DTPFMOTM). (Kemensos.go.id)

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Optimalisasi**

Menurut WJS Poerwadaminta (Istilah Laili, 2000:8) berasal dari kata optimum yang artinya yang terbaik, paling menguntungkan. Dalam hal ini, optimalisasi membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi, sedangkan optimum merupakan tingkatan yang paling menguntungkan dalam batas-batas tertentu dalam pengoptimalan merupakan penyempurnaan sesuatu sistem supaya berprestasi sebaik-baiknya atas dasar kriteria-kriteria tertentu

Ada tiga elemen permasalahan yang diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan dan sumber daya yang dibatasi :

1. Tujuan
2. Alternatif keputusan
3. Sumberdaya yang dibatasi

### **Kinerja**

Menurut (Prawirosentono, 1999) ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

- a) Efektifitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu bisa dicapai, kita dapat mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak bisa dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau diremehkan maka kegiatan tersebut efisien.
- b) Otoritas (wewenang)

- c) Disiplin
- d) Inisiatif

Menurut Agus Dwiyanto (2008: 49-51) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga indikator-indikator yang melekat pada penggunaan jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, responsivitas. Untuk itu Agus Dwiyanto mengemukakan lima indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- a. Produktivitas  
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Kualitas layanan  
Dengan menggunakan indikator ini, informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.
- c. Responsivitas  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas  
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar atau sesuai dengan kebijakn organisasi.
- e. Akuntabilitas  
Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat sebesar besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Sehubungan dengan Penelitian Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Kota Batu menggunakan 3 indikator yaitu : Efektivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas.

### **Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Menurut Kementrian sosial (2016: 6) Kelompok usaha bersama adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk,

tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang didalamnya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Pengelolaan UEP dapat melalui wadah kelompok usaha bersama (KUBE). Ini sekaligus metode dalam penanganan fakir miskin perkotaan untuk mengembangkan aktifitas sosial dan ekonomi fakir miskin diarahkan untuk mengembangkan interaksi sosial, dan saling peduli satu sama lain guna memecahkan permasalahanan memenuhi kebutuhan. Selain itu, fakir miskin diarahkan untuk memiliki sumber penghasilan yang tetap, layak dan berkelanjutan, memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial.

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami menemukan dan menggambarkan fenomena secara alamiah sesuai fakta dilapangan.

## **Pembahasan**

### **Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Kota Batu**

Menurut Agus Dwiyanto (2008: 49-51) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik publik tidak cukup hanya menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga indikator-indikator yang melekat pada penggunaan jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, responsivitas.

Tetapi dalam hal ini untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang digunakan peneliti untuk penilaian kinerja yang diambil hanya 3 indikator yaitu efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Hal itu sudah cukup untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Batu dalam menjalankan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE)

- a. Efektivitas  
Efektifitas disini digunakan sebagai pengukuran dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditentukan. Tingkat keberhasilan dari

pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada pada Kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang ditujukan kepada Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan bahwa, KUBE yang ada di Kota Batu dikatakan belum efektif. Karena jika dilihat dilapangan pada tahap persiapan pelaksanaan program KUBE ini ada tahap sosialisasi, dimana sosialisasi ini jika dinilai belum cukup memberikan informasi dan pemahaman terhadap penerima KUBE.

- b. Responsivitas.  
Indikator untuk Bentuk tanggapan yang bisa menjadi tolak ukur tidak baiknya indikator responsivitas ini yaitu : memfasilitasi para pengurus kelompok usaha bersama (KUBE) yang ada di Kota Batu dengan membantu mengajukan bantuansarana prasaran kepada Dinas Provinsi agar bisa dikabulkan atau diterima untuk usulan sarana prasarana kebutuhan kelompok usaha bersama (KUBE). Tidak hanya itu bentuk responsivitas yang dilakukan Dinas Sosial untuk KUBE Produksi. Dinas Sosial berinisiatif untuk bekerjasama dengan Disperindag, dimana fungsi kerjasama ini terkait untuk labelisasi produksi kelompok usaha bersama(KUBE). Agar nilai jual bisa tinggi dipasaran lalu produk lebih mudah untuk dipasarkan.

- c. Akuntabilitas  
Jadi terkait akuntabilitas Dinas Sosial Kota Batu sejak program pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE yang di mulai tahun 2017 yang dimulai dari kecamatan Batu, pada sejak itu Dinas Sosial membuat laporan pertanggung jawaban ke pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa akuntabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu, cukup baik. Karena pada setiap tahunnya dari mulai tahun 2017 Dinas Sosial membuat laporan pertanggung jawaban yang diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Meskipun didalamnya terdapat kekurangan pertanggung jawaban untuk tahu 2019 kemarin pelaporan untuk KUBE ini belum dibuat karena Dinas Sosial Kota Batu masih mensurvey beberapa KUBE aktif tidaknya itu juga dapat pengaruh di laporan pertanggung jawaban.

### **Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pengoptimalan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama)**

Didalam kinerja Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua faktor yang menjadi kendala dari pelaksanaan program KUBE: 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE, 2) Kurangnya sosialisasi penyampaian informasi dalam pelaksanaan program KUBE.

### **Pihak yang terlibat dan perannya dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE**

Menurut pendapat dari Wahab (2012:133) bahwa implementasi program ditetapkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor maupun organisasi. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kota Batu, pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan yaitu: Kementerian sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Batu, Dinas terkait (Dinas perindustrian dan perdagangan dan Dinas Kesehatan), Pihak Kecamatan, Pihak Kelurahan/Desa, Pendamping KUBE, Pengurus dan anggota KUBE

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, Kinerja Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Kota Batu. Cukup baik walaupun terdapat kekurangan-kekurangan yang masih ada. Dalam penelitian ini ada tiga indikator yaitu Efektivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas.

Pada indikator responsivitas upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu antara lain dapat dilihat dari bentuk daya tanggap Dinas Sosial dalam melaksanakan program KUBE. Bentuk responsivitas Dinas Sosial Kota Batu terhadap pelaksanaan program KUBE di Kota Batu sudah baik di responsivitas, karena pihak Dinas Sosial sendiri sangat memberikan tanggapan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok usaha bersama (KUBE).

Bentuk tanggapan yang bisa menjadi tolak ukur tidak baiknya indikator responsivitas ini yaitu: memfasilitasi para pengurus kelompok usaha bersama (KUBE) yang ada di Kota Batu dengan membantu mengajukan bantuansarana prasarana kepada Dinas Provinsi agar bisa dikabulkan atau diterima untuk usulan sarana prasarana kebutuhan kelompok usaha bersama (KUBE). Tidak hanya itu

bentuk responsivitas yang dilakukan Dinas Sosial untuk KUBE Produk. Dinas Sosial berinisiatif untuk bekerjasama dengan Disperindag, dimana fungsi kerjasama ini terkait untuk labelisasi produksi kelompok usaha bersama (KUBE).

Dinas Sosial tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dalam proses upaya penanggulangan kemiskinan. Namun terkait pelaksanaan program KUBE, Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap laporan pelaksanaan program KUBE cukup baik. Karena pada setiap tahunnya dari mulai tahun 2017 Dinas Sosial membuat laporan pertanggung jawaban yang diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) mempunyai peran, tugas dan wewenang masing-masing. Baik aktor yang berasal dari pusat maupun aktor yang terlibat dari daerah. Untuk aktor yang berasal dari pusat yaitu Kementerian Sosial yang bertindak sebagai pembuat kebijakan.

Untuk kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama ini yaitu 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE, 3) Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan program KUBE.

### **Saran**

Setelah melakukan penelitian dan analisis data, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Batu:

1. Perlunya dilakukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia sendiri pada anggota kelompok usaha bersama (KUBE).
2. Perlunya peningkatan sosialisasi oleh pendamping KUBE yang dipilih dari Dinas Sosial.
3. Peningkatan monitoring yang perlu juga ditingkatkan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Batu. Karena pada pelaksanaan monitoring ini bertujuan sampai dimana perkembangan KUBE yang ada di kota Batu.

### **Daftar Pustaka**

- Bahri Efri Samsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Indonesia, K. S. (2016). *Pedoman Teknis Pemberdayaan Fakir Miskin*. Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- Kementrian Sosial. (2010). *Modul Pendampingan Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial.
- Moelong, L. (2014). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiyadi, S. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Studi Evaluasi Penanggulangan di Lima Provinsi*. Jakarta Timur: P3KS Press.
- Santoso Djonet. (2017). *Penduduk Miskin Transient; Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinambela. (2012). *Kinerja Pegawai; Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno Muhammad. (2012). *Strategi Pemerintahan; Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Pusat Studi Metropolitan.
- Uno Hamzah, N. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.